

## **ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul Analisis Penyelenggaraan Ibadah Haji: Studi Pelaksanaan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Surabaya Tahun 2016 terfokus membahas penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan Instansi Kementerian Agama Kota Surabaya Tahun 2016. Dari judul tersebut diambil rumusan masalah (1) Bagaimana kebijakan Kementerian Agama Kota Surabaya dalam pelaksanaan Ibadah Haji Kota Surabaya Tahun 2016? (2) Bagaimana analisis kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Surabaya pada tahun 2016? Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Mengetahui bagaimana kebijakan Kementerian Agama Kota Surabaya dalam pelaksanaan Haji Kota Surabaya Tahun 2016. (2) Mengetahui analisis kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Surabaya pada tahun 2016.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan didukung dengan buku yang terkait dengan penelitian. Sehingga penyusunan penulisan bisa obyektif sistematis. Teknik pengumpulan data dengan merujuk data primer dan sekunder dengan menerapkan wawancara terstruktur dan mendalam, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kementerian Agama Kota Surabaya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji menggunakan kebijakan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain. (2) Bahwa Kementerian Agama Kota Surabaya berdasarkan analisis dengan teori kebijakan publik telah sesuai prosedur yakni mengikuti perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan lainnya. Dalam pelayanan, Kementerian Agama Surabaya memaksimalkan instrument IT sebagai pendukung kebijakan teknis berupa pembuatan fasilitas group whatsapp bagi calon jamaah haji dan pasca haji sebagai alat untuk sosialisasi info seputar haji. Untuk mendukung kinerja, Kementerian Agama Surabaya juga bekerja sama dengan banyak pihak agar ibadah haji berjalan dengan lancar., namun koordinasi secara intens dan mendalam dengan banyak pihak perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

**Kata Kunci :** Kebijakan Publik, Penyelenggaraan Ibadah Haji